“ Budaya Matrilineal dan Keterwakilan Perempuan dalam Legislatif Sumatera Barat 2024 ”

Alena Al Fatihani*), Lusia Astrika**)

Email : alenaalfatihani01@gmail.com

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Indonesia

Jl. Prof. Soedarto, SH., Tembalang, Semarang 50275, Kode Pos 1269

Website: <https://www.fisip.undip.ac.id/> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This study examines the relationship between matrilineal culture and women's representation in the legislative body of West Sumatra during the 2024 general elections. West Sumatra is known for its matrilineal system, where lineage and inheritance are passed down through the maternal line. In theory, this system is believed to provide strategic space for women within the social structure. However, in practice, women's participation and representation in formal politics, particularly in the legislature, remain low. The study uses a descriptive qualitative method through literature review, in-depth interviews, and documentation of election results and gender-affirmative policies. Findings show that although matrilineal culture is deeply rooted in Minangkabau society, its values do not automatically translate into the political sphere. Women still face structural and cultural barriers, such as the dominance of male political elites, the need for support from influential men to enter politics, high political costs, limited access to political education, non-inclusive party mechanisms, and weak implementation of affirmative action. It concludes that matrilineal culture is not a determining factor in increasing women's legislative representation. Therefore, efforts are needed to use matrilineal values as a supporting narrative, while increasing gender political literacy to foster more inclusive perceptions of women's roles and leadership in politics.

Keywords: Matrilineal Culture, Women's Political Participation, Women's Representation.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara demokrasi menjamin hak politik seluruh warga negara tanpa diskriminasi gender, agama, atau status sosial. Hal ini diatur dalam Pasal 43 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa *“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”* dan *“Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih secara bebas menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.”* Prinsip ini menegaskan bahwa setiap warga negara, termasuk perempuan, memiliki hak politik penuh dalam sistem demokrasi Indonesia.

Namun, dalam kenyataannya, partisipasi politik perempuan masih menghadapi berbagai tantangan. Upaya untuk memperkuat keterwakilan politik perempuan diatur melalui regulasi, dimulai dari UU No. 12 Tahun 2003

tentang Pemilu yang mengimbau partai politik untuk mencalonkan sekurang-kurangnya 30% perempuan dalam daftar calon legislatif. Sayangnya, aturan ini bersifat anjuran tanpa sanksi, sehingga implementasinya lemah dan belum signifikan. Penyempurnaan hadir dalam UU No. 10 Tahun 2008 yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30% perempuan di daftar calon sementara serta menerapkan *zipper system*, di mana setiap tiga bakal calon harus memuat sedikitnya satu perempuan. UU ini menjadi tonggak penting afirmasi politik perempuan di Indonesia, meski dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan tersebut sering hanya menjadi formalitas administratif (Cetro dalam Mukarom, 2008).

Perempuan masih menghadapi hambatan struktural dan kultural yang membuat mereka sulit bersaing menurut Azrial dan Chandra (2022) dalam penelitiannya, peningkatan keterwakilan perempuan dalam pemilu terjadi melalui karena perjuangan yang terus menerus untuk mewujudkan persamaan dan keadilan terutama mewujudkan peraturan perundang-undangan yang keberpihakan dan peningkatan keterwakilan perempuan. Banyak partai

hanya mencalonkan perempuan untuk memenuhi kuota, tanpa memberikan akses memadai terhadap pendidikan politik, modal kampanye, atau jaringan dukungan. Perempuan sering dikesampingkan karena dianggap tidak sekompeten laki-laki dalam bidang politik (Marince, 2013). Stigma gender juga terus mengakar dalam masyarakat. Marince (2013) menyebut, masyarakat cenderung memandang laki-laki sebagai sosok maskulin, berani, tangguh, dan rasional, sedangkan perempuan dianggap lembut, emosional, dan lebih cocok berperan dalam ranah domestik. Stereotip ini memperlemah posisi perempuan dalam politik.

Menurut Sumriani (2004) dalam Mukarom (2008), perbedaan biologis perempuan sering dijadikan alasan pembenaran perbedaan peran gender. Laki-laki digambarkan sebagai pemimpin alamiah, sedangkan perempuan lebih cocok berperan dalam rumah tangga. Namun, perkembangan sosial telah mematahkan stereotip tersebut, karena banyak perempuan menunjukkan kemampuan memimpin dan bekerja keras setara dengan laki-laki. Susilo (2018) menegaskan bahwa keterwakilan perempuan yang ideal bukan hanya soal angka, melainkan juga kualitas peran mereka dalam

memengaruhi arah kebijakan yang berdampak pada masyarakat luas.

Konteks Sumatera Barat, yang dikenal dengan sistem kekerabatan matrilineal, menambah kompleksitas isu ini. Matrilineal, sebagaimana dijelaskan Navis (1984), menempatkan perempuan pada posisi sentral dalam keluarga dan adat, terutama dalam hal pewarisan dan pengelolaan harta pusaka. Namun, budaya ini tidak secara otomatis memperkuat posisi perempuan di politik. Desri dan Yanda (2023) menyatakan, Sejarah menunjukkan bahwa perempuan Minangkabau berperan dalam partisipasi politik, baik dalam ranah domestik maupun publik. Bundo kanduang merespresentasikan perempuan yang dewasa yang bijaksana dan dipertimbangkan dalam mengambil keputusan. Namun Sumatera Barat memiliki kedudukan yang buruk dalam politik perempuan. Perempuan Minangkabau tetap harus berjuang keras untuk mengakses ruang politik yang didominasi laki-laki.

Fenomena ini menunjukkan bahwa budaya matrilineal di Sumatera Barat hanya memberi ruang simbolik bagi perempuan, sedangkan dalam praktik politik, pola patriarkis tetap mendominasi. Akses perempuan ke

legislatif sering bukan karena kapabilitas individu atau dukungan budaya, melainkan berkat faktor struktural lain, seperti dukungan tokoh laki-laki dan modal politik (Iskandar, 2023). Bahkan setelah perempuan berhasil masuk parlemen, jumlah mereka yang sedikit sering tidak cukup kuat untuk memperjuangkan isu perempuan secara signifikan.

Untuk terjun ke politik perempuan harus memiliki modal. Modal menurut Pierre Bourdieu (1986) adalah kumpulan sumber kekuatan dan kekuasaan yang digunakan sebagai dasar posisi dalam masyarakat yang dimiliki oleh seseorang untuk menentukan keanggotaannya di dalam kelas sosial masyarakat. Modal merupakan konsep kunci dalam sosiologi yang menjelaskan bagaimana kekuasaan dan status sosial dipertahankan dan direproduksi dalam masyarakat. Modal bukan hanya sekadar kekayaan materi, tetapi juga mencakup tiga bentuk utama yaitu, modal politik, modal budaya, modal ekonomi. Ketiga modal ini menjadi hal yang penting dalam masyarakat, bahkan untuk berpartisipasi dalam politik dan jabatan publik ketiga modal tersebut menjadi hal yang harus diperhatikan.

Budaya dan politik memiliki hubungan timbal balik yang dinamis. Budaya membentuk nilai, norma, dan perilaku politik masyarakat, sementara kebijakan politik juga bisa mendorong perubahan budaya (Susilo, 2018). Misalnya, kebijakan afirmasi gender seperti kuota perempuan dalam legislatif dapat memengaruhi persepsi masyarakat tentang peran perempuan dalam politik. Sebaliknya, norma budaya yang kuat sering kali menjadi penghambat implementasi kebijakan afirmatif yang progresif. Di Sumatera Barat, meskipun matrilineal memberi legitimasi sosial bagi perempuan di ranah adat, ranah publik tetap dikendalikan oleh dominasi politik laki-laki.

Selain hambatan struktural dan kultural, perempuan juga menghadapi kendala modal politik. Mereka seringkali kekurangan modal sosial berupa jaringan politik yang kuat, modal ekonomi untuk membiayai kampanye, serta modal budaya berupa pengalaman organisasi atau pendidikan politik. Sementara laki-laki umumnya lebih mudah mengakses semua modal tersebut. Akibatnya, pencalonan perempuan sering hanya sebatas pelengkap daftar, bukan sebagai calon yang serius didorong untuk terpilih.

Sudarsono (2024), mengatakan pentingnya keterwakilan perempuan dalam lembaga politik tidak hanya berfokus pada jumlah yang besar, tetapi juga pada peran perempuan dalam memengaruhi keputusan-keputusan politik yang berdampak langsung pada kehidupan mereka dan masyarakat secara umum. Realitas politik di Sumatera Barat pada Pemilu 2024 menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD masih jauh dari kuota 30% yang diharapkan. Hal ini menegaskan adanya kesenjangan antara peran penting perempuan dalam budaya lokal dan akses mereka terhadap posisi strategis di ranah politik. Seperti dikatakan Susilo (2018), tanpa keterwakilan perempuan yang memadai, kebijakan publik cenderung bias maskulin dan mengabaikan kebutuhan perempuan. Oleh karena itu, perlu strategi komprehensif untuk memperkuat afirmasi politik perempuan, termasuk melalui penguatan literasi politik gender dan pemanfaatan nilai budaya matrilineal sebagai narasi pendukung, bukan hanya simbol.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan

bagaimana budaya matrilineal memengaruhi peluang dan dukungan politik terhadap perempuan di Sumatera Barat. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan tema penelitian. Subjek penelitian dipilih secara purposif agar informasi yang diperoleh relevan dan mendalam. Lokasi penelitian mencakup DPRD Sumatera Barat, KPU, dan LKAAM sebagai lembaga yang berkaitan langsung dengan isu budaya dan politik. Data dianalisis secara deskriptif interpretatif, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber agar hasil penelitian lebih objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Minangkabau merupakan komunitas yang unik dengan sistem kekerabatan matrilineal, di mana perempuan memegang peran penting sebagai pewaris garis keturunan, pemilik harta pusaka, dan pusat kehidupan sosial dalam kaum. Perempuan Minang tidak hanya berfungsi sebagai simbol budaya, tetapi juga sebagai penggerak kehidupan adat dan penjaga nilai-nilai moral keluarga. Meski demikian, dalam ranah politik formal, keterwakilan perempuan masih belum mencerminkan kedudukan kuat yang mereka miliki dalam struktur

sosial adat. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pencalonan perempuan dalam pemilu sering kali hanya bersifat simbolis demi memenuhi kuota 30% tanpa dukungan konkret dari partai politik. Banyak calon legislatif perempuan yang belum dipersiapkan secara matang dan tidak mendapatkan pelatihan atau modal politik yang memadai. Ini mengakibatkan rendahnya angka keterpilihan perempuan di DPRD Sumatera Barat, meskipun budaya matrilineal diyakini mendukung kesetaraan gender.

Dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan, baik dalam adat maupun politik, masih sangat kuat. Perempuan cenderung ditempatkan dalam peran simbolis, sementara posisi strategis tetap dikuasai oleh kaum laki-laki. Konservatisme agama dan budaya patriarkal memperkuat pandangan bahwa perempuan sebaiknya berfokus pada ranah domestik, bukan mengambil peran di ruang publik. Partai politik belum secara optimal menjalankan fungsi pendidikan politik untuk perempuan.

Minimnya dukungan struktural membuat caleg perempuan kesulitan mendapatkan posisi strategis dalam daftar calon. Selain itu, persepsi masyarakat yang meragukan kapasitas kepemimpinan perempuan menjadi

tantangan tambahan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, keterwakilan perempuan di DPRD Sumbar meski mengalami peningkatan, masih belum memenuhi harapan secara kualitas dan distribusi wilayah. Dukungan sosial dari kaum dan budaya gotong royong seharusnya menjadi kekuatan bagi perempuan untuk maju dalam politik. Namun, potensi ini belum tergarap maksimal karena hambatan struktural dan budaya yang masih kuat. Lima persoalan utama yang dihadapi perempuan dalam politik adalah: kekerasan, beban ganda, marjinalisasi, subordinasi, dan stereotip gender. Sumatera Barat, meski menganut sistem matrilineal, tidak luput dari bentuk ketidakadilan gender tersebut. Menurut Matland (2001 : 22) faktor - faktor yang mempengaruhi pola seleksi antara laki - laki dan perempuan sebagai berikut :

1. Persepsi yang sering dipegang adalah bahwa politik adalah untuk laki- laki, dan bahwa tidaklah pantas bagi wanita untuk menjadi anggota parlemen.
2. Proses seleksi dalam partai politik. Seleksi terhadap para kandidat yang seing mengutamakan Laki -laki, dan pejabat penting partai.
3. kandidat biasanya dilakukan oleh sekelompok kecil pejabat atau pimpinan partai, yang hampir selalu

laki-laki. Perempuan tidak memperoleh banyak dukungan dari partai-partai politik karena struktur kepemimpinannya didominasi oleh kaum laki-laki.

4. Berhubungan dengan media yang berperan penting dalam membangun opini publik mengenai pentingnya representasi perempuan dalam parlemen.
5. Tidak adanya jaringan antara organisasi massa, LSM dan partai-partai politik untuk memperjuangkan representasi perempuan.

Jika perempuan dapat memanfaatkan budaya matrilineal ini sebagai modal sosial dalam keikutsertaan mereka sebagai politisi disisi lain peran mereka dalam pemegang harta pusaka keluarga juga dapat dimanfaatkan sebagai modal pendanaa pencalonan mereka sebagai politisi, Dalam sistem matrilineal, perempuan memiliki hak atas harta pusaka tinggi, seperti tanah dan rumah gadang, yang diwariskan turun-temurun melalui garis keturunan ibu. Kepemilikan ini memberikan stabilitas ekonomi yang dapat dimanfaatkan sebagai aset untuk mendukung aktivitas politik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Meski budaya matrilineal memiliki peluang bagi keterwakilan atau partisipasi politik perempuan itu sendiri disisilain adanya hambatan dalam realita yang menyebabkan sulitnya realisasi keterwakilan perempuan dalam konteks budaya matrilineal ini. Struktur adat dan politik di Sumatera Barat masih didominasi oleh laki-laki, yang membatasi peran perempuan di ruang publik. Hal ini membuat perempuan memiliki keterbatasan dalam mengakses posisi strategis di dalam struktur adat maupun dalam arena politik formal.

Strategi dalam pemberdayaan perempuan di bidang politik mencakup pelatihan kepemimpinan, penguatan modal sosial dan finansial, serta penggunaan media digital sebagai sarana kampanye dan komunikasi politik. Investasi sosial dalam bentuk kedekatan dengan masyarakat juga terbukti menjadi kunci keberhasilan. Perempuan perlu membangun kredibilitas melalui rekam jejak dan kontribusi nyata sebelum masa kampanye berlangsung. Komunikasi politik perempuan sangat penting untuk mematahkan stigma dan memperkuat narasi kepemimpinan mereka. Komunikasi dua arah yang membangun hubungan emosional dengan pemilih

lebih efektif dibanding pendekatan struktural.

Perempuan Minang perlu mengedepankan pendekatan berbasis komunitas, mengangkat isu-isu yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan menampilkan nilai-nilai kejujuran serta integritas. Di sisi lain, partai politik harus bertanggung jawab menyiapkan kader perempuan tidak hanya sebagai pengisi kuota, tetapi sebagai calon legislatif yang kompeten. Pendidikan politik berbasis gender, pelatihan strategi kampanye, dan advokasi kebijakan afirmatif menjadi langkah penting dalam mendorong keterwakilan perempuan yang substansial. Budaya matrilineal harus dijadikan kekuatan substantif, bukan hanya simbolik. Dukungan adat, jika disinergikan dengan strategi modern dan penguatan kapasitas politik, dapat membuka ruang lebih luas bagi perempuan. Namun hal ini harus dibarengi dengan kesadaran kolektif bahwa perempuan memiliki hak dan kemampuan yang setara untuk menentukan arah pembangunan masyarakat.

Sejauh ini budaya matrilinea memiliki kontribusi yang sangat minim terhadap motivasi serta keberhasilan perempuan dalam politik khususnya dala

legislatif. Secara keseluruhan, keberhasilan perempuan dalam politik Sumatera Barat akan sangat bergantung pada komitmen bersama antara masyarakat adat, partai politik, serta para pemangku kepentingan lainnya. Tanpa perubahan struktural dan budaya yang mendukung, kuota 30% hanya akan menjadi angka tanpa makna. Perempuan Minangkabau harus dapat menembus batas simbolik dan berkontribusi nyata dalam proses legislasi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di Sumatera Barat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa budaya matrilineal dalam masyarakat Minangkabau tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Sumatera Barat. Meskipun perempuan secara adat memiliki posisi penting sebagai pewaris garis keturunan, pemilik harta pusaka, dan tokoh simbolik dalam keluarga seperti dalam sosok Bundo Kandung fakta ini belum mampu diterjemahkan menjadi kekuatan yang nyata dalam dunia politik formal. Sistem matrilineal yang sering dianggap berpihak pada

perempuan ternyata tidak secara otomatis menjamin dukungan elektoral atau representasi politik yang setara. Dalam praktiknya, dominasi laki-laki masih kuat, baik dalam lembaga adat maupun struktur partai politik, sehingga pengambilan keputusan strategis termasuk pencalonan dan penguatan posisi perempuan tetap berada di bawah kendali elit politik laki-laki. Dengan demikian, keterkaitan antara budaya matrilineal dan peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif lebih bersifat simbolis daripada substansial.

Di sisi lain, budaya matrilineal sebenarnya menyimpan potensi sebagai modal sosial dan kultural yang harusnya dapat dimanfaatkan oleh perempuan dalam membangun basis legitimasi politik. Nilai-nilai yang melekat dalam struktur kekerabatan matrilineal, seperti rasa tanggung jawab kaum terhadap perempuan, solidaritas keluarga besar, serta posisi sentral perempuan dalam urusan domestik, dapat menjadi landasan untuk memperluas pengaruh ke ranah publik dan politik. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dimaksimalkan karena masih adanya tantangan struktural, seperti rendahnya partisipasi perempuan dalam organisasi partai, minimnya dukungan finansial dan

logistik selama kampanye, serta stigma sosial terhadap perempuan yang aktif di dunia politik. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya reinterpretasi budaya matrilineal agar tidak hanya menjadi warisan identitas, tetapi juga diartikulasikan secara progresif sebagai strategi kolektif untuk memperkuat representasi perempuan dalam sistem politik, khususnya dalam kontestasi legislatif di Sumatera Barat.

SARAN

Upaya mendorong pengembangan kajian lebih lanjut terkait keterkaitan antara budaya matrilineal dan keterwakilan politik perempuan di Minangkabau. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya mereplikasi temuan ini, tetapi juga memperluas perspektif analisis dengan mengkaji lebih dalam bentuk-bentuk patriarki yang terselubung dalam sistem budaya matrilineal

DAFTAR PUSTAKA

- Bourdieu, P. (2021). *Pertanyaan-pertanyaan sosiologi* (S. A. Herwinarko, Penerj.; T. Setiadi, Ed.). Yogyakarta: IRCiSoD. Diakses dari <https://opac.perpusnas.go.id>

- diakses pada 16 Juni 2025,
pukul 08.30 WIB
- Chandra, H., & Arizal, H. (2022). *Pengaruh Keterwakilan Perempuan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat*. Kertha Wicaksana, 16(1), 21-34
- Desri, S., & Yanda, V. P. (2023). *Peran Politik Kepemimpinan Perempuan dalam Sistem Matrilineal di Minangkabau Sumatera Barat*. Ilmu Ekonomi dan Akuntansi, 4(2), 87-98.
- Iskandar, I. (2023). *Perempuan dan Demokrasi Lokal di Minangkabau*. Jurnal Ceteris Paribus, 2(1), 46–55.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Matland, R. E. (1993). *Institutional variables affecting female representation in national legislatures: The case of Norway*. *The Journal of Politics*, 55(3), 737–755
- Marince, Y. (2013). *Pengarusutamaan gender dalam kehidupan politik di Indonesia*. JIPSI: Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM, 1(1)
- Mukarom, Z. (2008). *Perempuan dan politik: studi komunikasi politik tentang keterwakilan perempuan di legislatif*. Mediator: Jurnal Komunikasi, 9(2), 257-270.
- Navis, A. A. (1984). *Alam berkembang jadi guru: Adat dan kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Sudarsono, A. B. (2024). *Politik Perempuan Perempuan Politik: perjalanan politik perempuan di Indonesia*.
- Susilo, M. E. (2018). *Strategi Komunikasi Politisi Perempuan*. Jurnal Ilmu Komunikasi, 16(1), 54-65.

Peraturan Perundang - Undangan Undang

Undang Dasar Tahun 1945

UU Nomor 39 Tahun 1999

UU No 2 Tahun 2008

UU No. 10 Tahun 2008